



LAPORAN KINERJA

TAHUN ANGGARAN
2025

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
NEGARA DAN LELANG BEKASI**

**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA**

Jln. Sersan Aswan No. 8 D, RT002/RW009, Margahayu, Kota Bekasi, Jawa Barat

Telp. (021) 8808888 – Faks (021) 8803832

www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bekasi

@kpknl_bekasi



DAFTAR ISI

Daftar Isi	
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi, Visi Dan Misi serta Struktur Organisasi KPKNL Bekasi ...	2
C. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issue</i>) Pada KPKNL Bekasi	5
Bab II Perencanaan Kinerja	8
Bab III Akuntabilitas Kinerja	11
A. Capaian Kinerja Organisasi	11
B. Realisasi Anggaran	35
C. Inovasi Dan Prestasi Kinerja.....	35
Bab IV Penutup	39
Lampiran.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kementerian Keuangan selaku Kementerian yang membidangi urusan keuangan, memegang peranan penting untuk mengatur pola keuangan agar penyelenggaraan negara tetap terus berjalan. Tata kelola negara diuji untuk merubah paradigma atau cara pandang dalam tata Kelola pemerintahan dan budaya kerja aparatur negara sehingga lebih cepat tanggap dan melayani, yang turut memberikan arah positif terhadap pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*), dan sumber daya manusia. Pembaharuan dan perubahan hanya dapat diwujudkan dengan melakukan langkah-langkah bertahap yang dilandasi tindakan-tindakan konkret dan realistis, serta melakukan revisi atas berbagai regulasi maupun kebijakan sesuai dengan kondisi yang terjadi.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai bagian dari Kementerian Keuangan memiliki peran strategis dalam pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan lelang, khususnya terhadap pengelolaan aset negara. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi sebagai salah satu dari instansi vertikal DJKN merupakan ujung tombak yang langsung berhubungan dengan masyarakat atau pengguna jasa (*stakeholder*), terus berupaya meningkatkan pelayanan dan kinerja secara sistematis dan berkesinambungan dengan memaksimalkan sumber daya yang ada. Penyelenggaraan pelayanan publik tidak semata-mata ditujukan pada pemenuhan hak-hak sipil warga negara dan pemenuhan kebutuhan dasarnya, akan tetapi juga dilakukan dengan optimal untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik secara sinergis dan komprehensif sehingga terwujud pelayanan terbaik dan sikap kerja yang berintegritas, profesional, akuntabel, transparan, dan memiliki karakteristik sesuai dengan tujuan reformasi birokrasi.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan oleh KPKNL Bekasi dalam melakukan penyelenggaraan pelayanan public adalah meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan secara konsisten dengan berpedoman pada standar pelayanan publik sebagaimana diatur dalam:

1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Keputusan Menteri keuangan Nomor 55/KMK.01/2020 tentang Program Reformasi Birokrasi dan Tranformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2020 -2024;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 46/PMK.01/2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.01/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
6. Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor: Kep-60/KN/2023 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Perubahan tata kelola pemerintahan yang harus cepat tanggap dalam penyelenggaraan negara dan perubahan tata kelola keuangan negara bertujuan untuk meningkatkan kualitas dalam pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Perbaikan akuntabilitas dan transparansi keuangan negara merupakan bagian terpenting dari penegakan tata kelola pemerintahan sehingga menjadi titik temu yang menggerakkan roda-roda perubahan tata kelola pemerintahan. KPKNL Bekasi sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, menjadi salah satu pilar dalam mewujudkan perubahan besar terhadap tata kelola keuangan negara yang dicanangkan oleh Menteri Keuangan, dengan dilandasi oleh tiga paket undang undang di bidang keuangan negara, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; dan
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Salah satu peranan KPKNL dalam mewujudkan perubahan tata kelola keuangan negara tersebut diantaranya adalah mewujudkan nilai kekayaan negara (Barang Milik Negara) yang wajar dalam neraca pemerintah (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) melalui kegiatan inventarisasi dan penilaian Barang Milik Negara. KPKNL Bekasi terus menyikapi dengan rasa bakti kepada negara untuk semakin memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat luas agar roda perekonomian terus berputar.

Sebagai wujud dari keberhasilan KPKNL Bekasi dalam upaya meningkatkan pelayanan dan kinerja adalah terpilihnya KPKNL Bekasi sebagai unit yang diikutsertakan dalam beberapa kegiatan, antara lain:

1. Kantor berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sejak tahun 2018.
2. Meraih penghargaan Kantor Berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2020.

B. TUGAS, FUNGSI, VISI DAN MISI SERTA STRUKTUR ORGANISASI KPKNL BEKASI

Berdasarkan Pasal 30 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Bekasi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut KPKNL Bekasi menyelenggarakan fungsi:

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
2. Registrasi, Verifikasi dan Analisa Pertimbangan Permohonan Pengalihan serta Penghapusan Kekayaan Negara;
3. Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
5. Pelaksanaan Pelayanan Penilaian;
6. Pelaksanaan Pelayanan Lelang;
7. Penyajian Informasi di bidang kekayaan negara, penilaian dan lelang;
8. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
9. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
10. Pelaksanaan administrasi KPKNL.

KPKNL Bekasi sebagai Kantor Berpredikat WBK dan WBBM, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan lelang. KPKNL Bekasi berperan dalam meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara dan bea lelang, maupun dalam melakukan pengamanan kekayaan negara melalui kegiatan inventarisasi dan penilaian Barang Milik Negara dan sertifikasi tanah pemerintah (Penertiban Barang Milik Negara). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPKNL Bekasi selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Kementerian Keuangan guna mewujudkan reformasi birokrasi berkesinambungan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam rangka memberikan arah, inspirasi, serta menjaga semangat kerja seluruh jajarannya, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam hal ini KPKNL Bekasi memiliki visi dan misi sebagai berikut:

VISI

“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan:
Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

MISI

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat;

Dalam tatanan operasional, visi dan misi tersebut akan terus diupayakan untuk dicapai. Untuk mencapai visi dan misi tersebut, KPKNL Bekasi telah memberi motivasi dan arah kerja kepada seluruh pegawai dengan pedoman "**Melayani dengan SMART**" yaitu Simpatik, Mumpuni, Akuntabel, Responsif dan Terukur. Melalui moto tersebut, diharapkan setiap pegawai KPKNL Bekasi dalam melaksanakan tugas, selalu:

1. Simpatik

Simpatik dalam setiap melaksanakan tugas dan kegiatan pelayanan kepada *stakeholder*.

2. Mumpuni

Organisasi yang tangguh dan teruji dalam menghadapi tantangan dan perubahan.

3. Akuntabel

Produk pelayanan yang cepat, akurat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Responsif

Cepat tanggap dalam melayani pengguna jasa.

5. Terukur

Memberikan pelayanan dengan standar waktu yang telah ditetapkan, sehingga pengguna jasa merasakan pelayanan murah, cepat, dan tepat waktu.

Dengan pedoman “Melayani dengan SMART”, Simpatik, Mumpuni, Akuntabel, Responsif, dan Terukur, KPKNL Bekasi selalu memegang komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*).

STRUKTUR ORGANISASI KPKNL BEKASI

STRUKTUR ORGANISASI



KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL



AHMAD FANANIE
PELELANG AHLI
MADYA



GUNARDI
PELELANG AHLI
MUDA



ALIM BAHRI
PELELANG AHLI
MUDA



RR. NIEKEN ARUM K.
PELELANG AHLI
MUDA



NOMIE ARUMSARI
PELELANG AHLI
MUDA



ANICE KASIM
PELELANG AHLI
PERTAMA



FARIHA
PELELANG AHLI
PERTAMA



SYAIPUR ROKHMAN
PENILAI
PEMERINTAH AHLI
MUDA



D. RIO ARDI P
PENILAI
PEMERINTAH AHLI
PERTAMA



MAHARANI KUMALASARI
PENILAI
PEMERINTAH AHLI
PERTAMA



PALTA ABDI ALAM
PRANATA
KEUANGAN
APBN MAHIR



ENDANG SULISTYOWATI
BENDAHARA
PENGELUARAN

C. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUE*) PADA KPKNL BEKASI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya (*business process*) untuk mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi, KPKNL Bekasi mengalami beberapa kendala/permasalahan, diantaranya sebagai berikut:

a. Permasalahan pada Subbagian Umum

Beberapa permasalahan yang terjadi pada Subbagian Umum pada KPKNL Bekasi, sebagai berikut:

- a. Berkaitan dengan kinerja anggaran, kendala yang dihadapi yakni untuk lebih memaksimalkan nilai IKPA dan IKKPA pada akhir tahun dibutuhkan komitmen dari masing-masing seksi dan subbagian umum dalam menyusun rencana kebutuhan penarikan dana bulanan dengan target realisasi.
- b. Berkaitan dengan pengembangan kompetensi pegawai, kendala yang dihadapi yakni perlunya manajemen waktu agar tugas dan fungsi dari pegawai dalam membangun kompetensi diri., pengembangan diri, untuk tujuan organisasi yang lebih baik dapat terlaksana.

b. Permasalahan pada Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

Beberapa kendala/permasalahan pada Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara adalah sebagai berikut:

- a. Berkaitan dengan realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara, kendala yang dihadapi yakni
 - 1) Masih perlu adanya penggalan potensi dari pengelolaan BMN.
 - 2) Jumlah satuan kerja di KPKNL Bekasi relatif lebih sedikit (61 satker), sehingga potensi dari pengelolaan BMN juga rendah.
- b. Berkaitan dengan evaluasi kinerja BMN, kendala yang dihadapi yakni
 - 1) Data terkait biaya pengelolaan BMN dari Satker terkait yang didapatkan memakan waktu.
 - 2) Beberapa satker terkadang ada kegiatan lain sehingga membuat jadwal survei diubah waktunya.
 - 3) Terdapat penambahan prosedur penyampaian laporan pada tahun 2025 sehingga akan menambah waktu penyelesaian termasuk menunggu Satker untuk menindaklanjuti via SIMANv2.
 - 4) Aplikasi SIMANv2 yang terkadang mengalami trouble serta sering diadakan maintenance pada aplikasi SIMANv2 sehingga memperlambat pelaksanaan pengerjaan hasil evaluasi kinerja BMN.

c. Permasalahan pada Seksi Piutang Negara

Beberapa permasalahan dalam pengurusan Piutang Negara pada KPKNL Bekasi, sebagai berikut:

- a. Berkaitan dengan realisasi penerimaan negara dari pengurusan piutang negara, kendala yang dihadapi yakni debitur-debitur mengangsur dengan nominal yang tidak signifikan, hanya 1 debitur BPJS-TK yang melakukan angsuran cukup besar.
- b. Berkaitan dengan realisasi penyelesaian berkas piutang negara, kendala yang dihadapi yakni masih terdapat banyak debitur yang perlu dikonfirmasi ulang terkait dengan keberadaan maupun kemampuan dalam menyelesaikan kewajiban terhadap negara.

d. Permasalahan pada Seksi Hukum dan Informasi

Permasalahan yang terjadi pada Seksi Hukum dan Informasi secara umum, yaitu berkaitan dengan penanganan permasalahan hukum, kendala yang dihadapi yakni:

- 1) Apabila terdapat putusan yang telah menang kemudian banding/kasasi apabila KPKNL tidak mengajukan kontra memori banding/kasasi sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap maka realisasi capaian tidak dapat dihitung.
- 2) Apabila pihak lawan mengajukan banding namun tidak membuat memori banding maka KPKNL tidak bisa mengajukan kontra memori banding sehingga capaian tidak bisa dihitung.
- 3) Hasil putusan menang / kalah tergantung pada penilaian Majelis Hakim Pengadilan.

e. Permasalahan pada Seksi Kepatuhan Internal

Beberapa permasalahan yang terjadi pada Seksi Kepatuhan Internal pada KPKNL Bekasi, sebagai berikut:

- a. Berkaitan dengan integritas, perlu untuk meningkatkan peran lini pertama dan kedua dalam rangka pencegahan, deteksi, dan monev pelanggaran disiplin termasuk integritas pegawai
- b. Berkaitan dengan kualitas manajemen kinerja dan resiko, kendala yang dihadapi yakni kapasitas sumber daya manusia saat ini belum memadai untuk mengimbangi peningkatan beban kerja yang terus meningkat dan penilaian/reviu dilakukan oleh Kanwil DJKN Jawa Barat
- c. Berkaitan dengan capaian unit kerja dalam keberlanjutan Pembangunan ZI WBK/WBBM, kendala yang dihadapi yakni Perlu koordinasi yang baik pada setiap tim kelompok kerja.

f. Permasalahan pada Seksi Pelayanan Lelang

Beberapa kendala/permasalahan pada Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara adalah sebagai berikut:

- a. Berkaitan dengan realisasi penerimaan negara dari lelang, kendala yang dihadapi yakni Capaian PNBPN pada triwulan IV Capaian PNBPN belum mencapai target 100% dikarenakan masih banyaknya lelang TAP.
- b. Berkaitan dengan realisasi pokok lelang, kendala yang dihadapi yakni Lelang yang laku masih relative untuk lelang dengan nilai limit kecil, sedangkan lelang dengan nilai limit dengan nominal besar masih TAP dan tidak belum terdapat lelang booming (*windfall*) sampai dengan 31 Desember 2025. meskipun pada bulan Desember terdapat capaian 95 M.
- c. Berkaitan dengan produktivitas lelang, kendala yang dihadapi yakni Limit lelang barang berupa tanah masih menggunakan nilai pasar sehingga tidak menarik peminat dan kondisi bangunan masih berpenghuni sehingga memerlukan upaya pengosongan bagi pembeli

g. Permasalahan pada Seksi Pelayanan Penilaian

Permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan tugas pada Seksi Pelayanan Penilaian yaitu berkaitan dengan tingkat kualitas layanan penilaian, kendala yang dihadapi yakni sesuai PMK Nomor 99 Tahun 2024 bahwa pada saat ini pelaksanaan penilaian telah didorong untuk menggunakan aplikasi SIP, dan terdapat update pada aplikasi sehingga perlu penyesuaian penggunaan dan perhitungan capaian.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Bekasi berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2025, telah disusun berdasarkan peta strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Kantor Pusat DJKN menetapkan target kinerja KPKNL Bekasi Tahun 2025 yang dituangkan dalam Kontrak Kinerja dan dijabarkan dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU), sehingga ikhtisar Kontrak Kinerja Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Kode	IKU	RAW Target 2025	Target 2025
Stakeholder Perspective(30%)			
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya		
1a-CP	Indeks Integritas	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	Rp28.400.000.000	100%
Customer Perspective(20%)			
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal		
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	Rp798.200.000.000	100%
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	RP1.300.000.000	100%
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa		
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74
3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77
Internal Process Perspective (25%)			
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif		

4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	100%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif		
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	80%	80\$
Learning & Growth Perspective (25%)			
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif		
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	48%
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif		
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif		
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80
8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	100

Program/Kegiatan 2025	Anggaran
Program: Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko Kegiatan 1. Komunikasi, Edukasi, dan Sandardisasi 2. Pengelolaan Aset	 Rp789,285,000 Rp30,094,000 Rp759,191,
Program: Program Dukungan Manajemen Kegiatan 1. Legislasi dan Litigasi 2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum 3. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik 4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	 Rp5,873,823,000 Rp30,740,000 Rp5,808,053,000 Rp14,997,000 Rp20,033,000

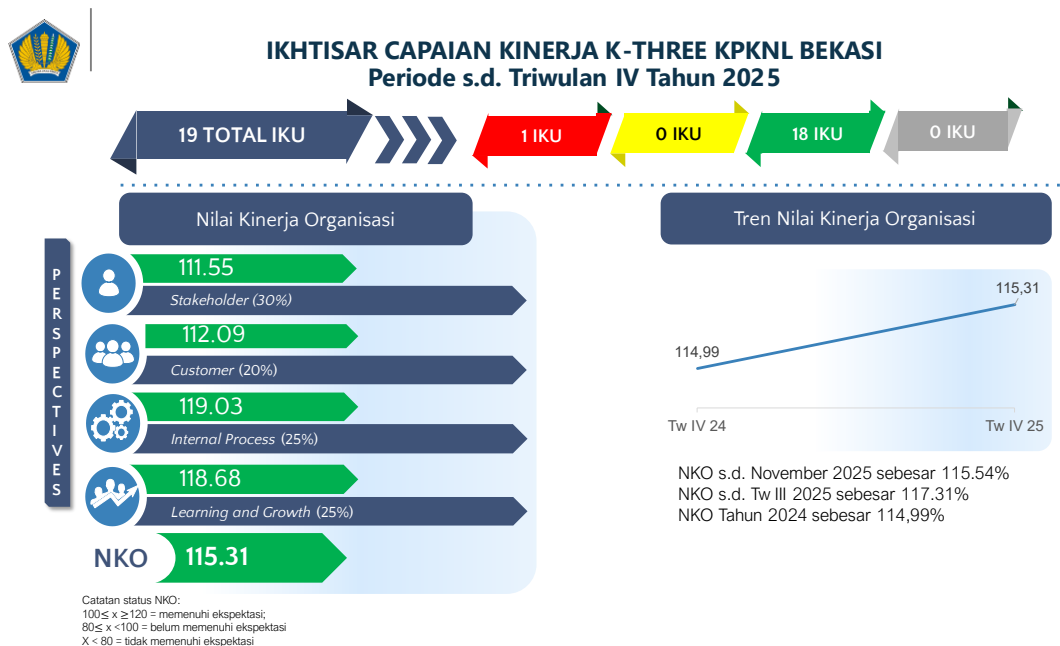
Kontrak Kinerja ini disusun dengan memperhatikan *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective* (Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal dan Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa), *Internal Process Perspective* (Penerapan tata kelola aset yang efektif dan Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif), serta *Learning and Growth Perspective* (Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif, Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif, dan Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif).

Penyusunan kontak Kinerja ini mengakomodir amanat yang tercantum dalam dokumen perencanaan strategis yang disusun dengan visi menjadi pengelola kekayaan negara dan lelang yang professional dan akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan “Menjadi penggerak transformasi ekonomi nasional melalui pengelolaan keuangan negara serta sektor keuangan yang proaktif, adaptif dan tepercaya, dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Tahun Anggaran 2025, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Bekasi tercatat sebesar 115,31%.



5

1. Gambaran tentang perbandingan antara target dan realisasi capaian kinerja tahun 2025:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	1a-CP Indeks integritas	100	105,32	105%
		1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	124,42%	124%
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	137,58%	137%
		2b-CP Persentase realisasi pokok lelang	100%	78,13%	78%
		2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	172,72%	173%

3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	88,3	119%
		3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	94,64	125%
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	100%	132,16%	132%
		4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	116,94%	117%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	100%	118,75%	119%
		5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	114,57%	164%
		5c-CP	Persentase produktivitas lelang	80%	136,66%	170%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	120	120%
		6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	120	120%
		6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	98%	123%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	112,06	112%
		7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	115,75	145%
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80	99,17	124%
		8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	120	120%

Jumlah Anggaran Program Tahun 2025 : Rp,6.693.637.000,00
 Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2025 : Rp,2.353.323.000,00

Bila diperhitungkan dengan anggaran yang diblokir sebesar RP4.288.259.000,00, maka realisasi belanja negara mencapai 97,83%.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja KPKNL Bekasi Tahun 2025 dengan

a. Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir dalam persentase adalah sebagai berikut:

No	IKU	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2024	REALISASI 2025
1	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	83,79%	144,54%	80,18%	126,61%	124%
2	Persentase Produktivitas Lelang	29,12%	39,66%	103,25%	124,76%	136,66%
3	Indeks Integritas	-	-	89,17	92,44	105,32
4	Persentase Realisasi Pokok Lelang	-	141,95%	73,06%	113,85%	78,13%
5	Persentase Penurunan Outstanding/Nilai Saldo Piutang Negara	122%	223,75%	127,31%	112,89%	172,72%
6	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	4,65	4,57	4,26	4,29	96,64
7	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	100%	82,90%	69,56%	77,85%	-
8	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	102,96%	101,14%	121,89%	126,77%	132,16%
9	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	-	-	-	41,25%	-
10	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100,57%	143,08%	117,33%	-	118,75%
11	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	100%	100%	-	-	-
12	Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	-	-	100,00%	-	-
13	Persentase Evaluasi Kinerja BMN	118,52%	102,88%	155,57%	366,67%	116,94%
14	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	-	0,80%	7,70%	0,17%	-
15	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	-	-	76,09	83,41	-

16	Tingkat Efektifitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	93,75%	97,14%	97,62%	96,15%	-
17	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	120%	120%	120%	113,50%	98%
18	Indeks kinerja kualitas kinerja anggaran	96,82%	93,01%	109,68	120	120
19	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	-	0,00%	0,00%	0,00%	-
20	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen yang Ditindaklanjuti	-	-	100,00%	-	-
21	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja Risiko	-	-	94,60	96,69	99,17
22	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	-	-	91,28	-	-
23	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	-	-	-	108,5	115.75
24	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	-	-	-	97,69	-
25	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	-	-	-	-	137,58%
26	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	-	-	-	-	88,03
27	Tingkat kualitas layanan penilaian	-	-	-	-	114,57%
28	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	-	-	-	-	120
29	Indeks penanganan permasalahan hukum	-	-	-	-	112,06
30	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	-	-	-	-	120

b. Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategi organisasi adalah sebagai berikut:

No	IKU	TARGET 2024	REALISASI 2025
1	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	70%	
2	Persentase Evaluasi Kinerja BMN berupa tanah dan bangunan	100%	116,94
3	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	100%	132,16
4	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	124,42%
5	Indeks implementasi pengasuransian BMN	70	
6	Persentase Efektifitas Penyelesaian BKPN	100%	118,75

7	Indeks efektivitas penyelesaian peraturan	70	
8	Tingkat akurasi data piutang negara		
9	Indeks efektivitas investasi pemerintah	4	
10	Persentase Pencapaian Hasil Lelang (Pokok Lelang)	100%	78,13%
11	Persentase Produktivitas Lelang	34%	136,66%
12	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	26%	
13	Pemenuhan Target Pengembangan Profesional Berkelanjutan (CPD) Penilai Pemerintah	100%	
14	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	4,20	96,64
15	Persentase penyelesaian delayering		
16	Tingkat implementasi learning organization	85%	
17	Persentase Pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya	87,83%	
18	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	95	120
19	Tingkat downtime sistem TIK	0,1%	
20	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	95%	
21	Indeks Integritas	92	105,32
22	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang ditindaklanjuti	90%	
23	Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Aset	80%	
24	Indeks efektivitas komunikasi publik	3,5	

c. Target Renja Kementerian Keuangan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2025	REALISASI 2025
1	Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara	100%	137,58%
2	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	124,42%
3	Tingkat kepuasan stakeholders dan pengguna layanan - Kementerian Keuangan (DJKN)	77	96,64
4	Indeks Integritas Organisasi - Kementerian Keuangan (DJKN)	100	105,32

3. Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

a. Sub Bagian Umum

- 1) Melakukan koordinasi secara berkala dengan KPPN Bekasi dan Kanwil Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat terkait pelaksanaan anggaran.
- 2) Melakukan multi layer checking pembuatan SPM dengan melibatkan Operator, Bendahara Pengeluaran, PPSPM, dan PPK.
- 3) Melakukan revisi administrasi dalam rangka penyesuaian halaman III DIPA.
- 4) Melakukan koordinasi dengan Seksi Teknis terkait rencana penarikan dana bulanan dan capaian output yang ditargetkan dalam DIPA
- 5) Melakukan koordinasi dengan KP DJKN dan Biro Pengadaan dan BMN Setjen Kemenkeu RI
- 6) Melakukan peninjauan/perkenalan dengan penyedia barang dan jasa/mitra kerja KPKNL Bekasi terkait pekerjaan PBJ dengan mekanisme penunjukan langsung.
- 7) Membuat Nota Dinas tentang Pelaksanaan Diklat
- 8) Membuat Program IDP- bagi pegawai
- 9) Mengusulkan pegawai untuk mengikuti Diklat melalui aplikasi Diklat

b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

- 1) Melakukan koordinasi dengan para satker terkait pemanfaatan aset
- 2) Melakukan percepatan penyelesaian proses persetujuan pemanfaatan sampai dengan mendorong percepatan terbitnya perjanjian sewa dan pembayaran sewa.
- 3) Melakukan koordinasi dengan satker terkait penerimaan yang berasal dari BLU.
- 4) Melakukan identifikasi data untuk pemilihan target dan telah diusulkan 11 NUP.
- 5) Melakukan koordinasi dengan Satker yang menjadi target.
- 6) Menyampaikan form pendataan kepada Satker.
- 7) Pendampingan kepada Satker.
- 8) Koordinasi dengan Satker terkait target sertifikasi tahun 2025.
- 9) Sosialisasi pensertipikatan BMN ke Satker pada tanggal 11 Februari 2025.
- 10) Koordinasi dengan Kantah.
- 11) Menyampaikan kepada Kanwil DJKN Jawa Barat terkait hasil koordinasi sertifikasi dengan Satker dan Kantah, termasuk usul penetapan lokasi.
- 12) Rapat dengan BBWS Cilicis dan BBWS Citarum pada tanggal 29 April 2025.
- 13) Rapat dengan PTJT pada tanggal 15 Mei 2025.
- 14) Rapat dengan KPKNL Jakarta IV, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Perindustrian terkait target K2 pada 22 Oktober 2025.
- 15) Telah dilaksanakan survei pada satker BPTIK, BPLJSKB, MTsN Cikarang, Lapas Kota Bekasi, KPPN Bekasi, Kanwil DJP Jawa Barat, KPP Bekasi Utara, dan MTsN 4 Bekasi.
- 16) Telah diselesaikan laporan evaluasi kinerja BMN pada Satker BPPTIK, MTsN Cikarang, Lapas Kelas IIA Bekasi, KPP Pratama Bekasi Utara, MTsN 4 Bekasi, BPLJSKB, Kanwil DJP Jawa Barat II, dan KPPN Bekasi

c. Seksi Piutang Negara

- 1) Koordinasi dengan BPJS TK Cikarang untuk pendampingan penagihan langsung.
- 2) Koordinasi terkait penyitaan barang jaminan debitur dengan KPKNL Bogor.
- 3) Penelusuran barang jaminan maupun HKL di wilayah KPKNL Serang, Pontianak dan Metro lelang yang berpotensi laku.
- 4) Koordinasi dengan BPJS TK Cikarang untuk pendampingan penagihan langsung.
- 5) Koordinasi terkait penyitaan barang jaminan debitur dengan KPKNL Bogor.
- 6) Penelusuran barang jaminan maupun HKL di wilayah KPKNL Serang, Pontianak dan Metro.
- 7) Meningkatkan pengurusan sampai ke tahap PSBDT untuk debitur KBMT Purwahasana.
- 8) Membuat KAK/TOR Edukom.
- 9) Penggalan potensi PN sekaligus Edukom mengenai syarat penyerahan, dokumen penyerahan, yang tidak boleh diserahkan, dan pengelolaan PN dengan PPDTO, kepada RSUD Kabupaten Bekasi.
- 10) Melaksanakan sosialisasi pada kegiatan KPKNL Bekasi Mendengar dan dilakukan penyebaran survei edukom, dengan nilai yaitu 88,82.

- 11) Melakukan penagihan dengan menyampaikan surat paksa;
 - 12) Intensifikasi penagihan secara berkala terhadap debitur yang telah diperoleh nomor handphone/rumah;
 - 13) Konfirmasi keberadaan debitur maupun ahli waris kepada aparat desa;
- d. Seksi Hukum dan Informasi
- 1) Menghadiri sidang secara efektif dan efisien sesuai tahapan penanganan perkara.
 - 2) Mengunggah jawab jinawab e-court secara tepat waktu supaya tidak tertinggal hak jawab.
 - 3) Menyampaikan kontra memori banding/kontra memori kasasi apabila pihak lawan membuat memori banding/memori kasasi
 - 4) Memberikan tanggapan/jawaban sesuai norma waktu yang ditentukan
 - 5) Menyampaikan laporan pengelolaan informasi publik kepada pelaksana PPID Tk. II (Kanwil) sesuai dengan norma waktu yang ditentukan
 - 6) Menyediakan, mengumumkan dan memutakhirkan Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta dan Informasi Publik Tersedia Setiap Saat secara berkala pada website KPKNL Bekasi
- e. Seksi Kepatuhan Internal
- 1) Telah dibuat unit pengendalian gratifikasi di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Barat
 - 2) Membuat pelaporan terkait gratifikasi, identifikasi titik rawan.
 - 3) Sosialisasi tolak dan lapor antigratifikasi/antikorupsi kepada stakeholder oleh kepala kantor
 - 4) Sosialisasi terkait korupsi pada kegiatan rabu cendikia kepada para pegawai KPKNL Bekasi
 - 5) Telah Melakukan identifikasi titik rawan (Risk Profiling) praktik gratifikasi dan menyampaikannya kepada Kanwil DJKN Jawa Barat
 - 6) Campaign/Internalisasi pencegahan pelanggaran disiplin di lingkungan DJKN
 - 7) Pemetaan/identifikasi benturan kepentingan serta monitoring dan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan
 - 8) Sosialisasi antikorupsi kepada pihak eksternal pada KPKNL Bekasi Mendengar
 - 9) Sosialisasi internal antikorupsi kepada para pegawai
 - 10) Internalisasi ketentuan dan kebijakan penggunaan fasilitas kantor terutama kendaraan dinas melalui nota dinas
 - 11) Melakukan pemantauan identifikasi titik rawan praktik gratifikasi
 - 12) Pelatihan/internalisasi mengenai mekanisme dan prosedur layanan serta pengelolaan pengaduan
 - 13) Publikasi infografis layanan sebagai bentuk edukasi/sosialisasi prosedur layanan kepada pengguna layanan
 - 14) Mewajibkan para pejabat dan pelaksana di lingkungan DJKN untuk mengikuti pelatihan penguatan integritas dan pencegahan korupsi
 - 15) Melaksanakan evaluasi program "Tali Kasih" khususnya terkait proses penyaluran/penggunaan dana dan efektifitas dampak program kepada pihak yang membutuhkan.

- 16) Menyusun kuesioner survei layanan untuk mengetahui tingkat kepuasan stakeholders terhadap pelayanan KPKNL Bekasi.
- 17) Menyebarkan kuesioner kepada stakeholder
- 18) Menyusun PK &PMR Kemenkeu Three
- 19) Menyusun SKP Eselon IV, Jabatan Fungsional, dan Pelaksana, Manual IKU, dan Lembar Penetapan Manual IKU, dan Matriks *Cascading* Tahun 2025.
- 20) Melaksanakan dokumentasi terkait pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengelolaan kinerja dengan baik, antara lain dokumen terkait *Refinement* Penyusunan IKU dan dokumentasi pelaksanaan penandatanganan SKP seluruh pejabat/pegawai,
- 21) Telah dilakukan pengumpulan dokumen kinerja pegawai diantaranya HEK & DEK, DKI.
- 22) Mengikuti e-learning terkait risiko
- 23) Telah dilakukan pengumpulan dokumen kinerja organisasi, pegawai dan risiko sesuai kertas kerja
- 24) Membuat SK tim keberlanjutan ZI WBK/WBBM
- 25) Membuat rencana kerja ZI WBK/WBBM.
- 26) Menyusun SK Agen Perubahan beserta program perubahannya.
- 27) Melengkapi dokumen secara bertahap.
- 28) Monitoring dan Evaluasi secara berkala
- 29) Melaksanakan dan menyampaikan dokumentasi terkait Integrity Week, dan SKPL Triwulan I
- 30) Bahan Paparan

f. Seksi Pelayanan Lelang

- 1) Melakukan koordinasi dengan pemohon lelang untuk meningkatkan capaian PNBP lelang
- 2) Memprioritaskan permohonan lelang yang sudah ada calon pembeli
- 3) Melakukan koordinasi dengan pemohon lelang untuk meningkatkan capaian PNBP lelang
- 4) Memprioritaskan permohonan lelang yang sudah ada calon pembeli
- 5) Melakukan FGD dengan para pemohon lelang, dan menyediakan link permohonan yg telah ada calon pembeli.
- 6) Membuat KAK/TOR Edukom;
- 7) Melaksanakan sosialisasi lelang pada bulan februari
- 8) Melaksanakan sosialisasi pada kegiatan KPKNL Bekasi Mendengar dan dilakukan penyebaran survei edukom, dengan nilai yaitu 88,82
- 9) Memprioritaskan lelang yang akan laku
- 10) Berkoordinasi dengan pemohon lelang untuk meningkatkan lelang yang laku
- 11) Mempercepat verifikasi lelang barang bergerak untuk meningkatkan produktivitas lelang melalui kegiatan verifikasi bersama
- 12) Melakukan Monev dengan pemohon lelang HT

g. Seksi Pelayanan Penilaian

- 1) Menyelesaikan permohonan penilaian
- 2) Menyelesaikan karya tulis terkait penilaian dan AMNES
- 3) Menyelesaikan survey basis data
- 4) Menyelesaikan alat bantu penilaian berupa DKPS Gedung Pertemuan
- 5) Menyelesaikan alat bantu penilaian berupa DKPB Tahun 2026

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

a. Sub Bagian Umum

- 1) Perhitungan IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKKPA) meliputi perhitungan terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup Nilai evaluasi kinerja anggaran kementerian negara/lembaga (SMART DJA) dan Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran kementerian negara/Lembaga (IKPA DJPB) yang ada pada unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan regulasi nasional.
Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan.
Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.
- 2) Terkait tata Kelola pengadaan barang dan jasa, satker vertikal berpotensi tidak memiliki komponen IKU yang masuk dalam bobot perhitungan, seperti e-Tendering/Seleksi, e-Purchasing, dan/atau e-Kontrak, terlebih lagi di Tahun ini, adanya inpres terkait kebijakan efisiensi yang berdampak berkurangnya pagu anggaran belanja modal. Kebijakan realisasi komponen SIRUP, capaian maksimal yang diakui sebesar 120%, mengingat adanya nilai capaian
- 3) Terkait pengembangan kompetensi pegawai, seluruh pegawai telah memenuhi 25 (dua puluh lima) Jam Pelatihan dengan minimal 1 (satu) pembelajaran sesuai Tusi masing-masing pegawai. Pada Triwulan IV, telah dilakukan 1 kegiatan sinergi antar generasi dan 1 kegiatan Bintel dengan pemateri Kepala KPKNL Bekasi, dengan peserta seluruh pegawai KPKNL Bekasi.

b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

- 1) PNBPN s.d. Desember 2025 sebesar Rp 15.069.257.247,00
Penambahan PNBPN s.d. Desember 2025 terdiri dari:
 - a. Sewa BMN sebesar Rp 1.012.534.465,00
 - b. Pemindahtanganan BMN sebesar Rp 4.718.957.204,00
 - c. Penjualan Barang Rampasan/Tegahan sebesar Rp 1.018.935.285,00
 - d. Pendapatan BLU Lainnya Rp 8.318.830.293,00
- 2) Target tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara Tahun 2025 terdiri dari 11 NUP BMN dengan target perhitungan untuk Q4 sebesar 100%
- 3) Realisasi s.d. Desember 2025 sebanyak 11 NUP dengan tingkat optimalisasi sebesar 137,58% (Lapas Kelas IIA Bekasi, KPP Pratama Bekasi Utara, BPLJSKB, PN Bekasi, dan KPPBC TMP Cikarang, LAPAS Kelas II Cikarang, Sentra Terpadu Pangudi Luhur).
- 4) Realisasi keseluruhan 11 NUP telah tercapai.

- 5) Total target sertifikasi pada KPKNL Bekasi sebanyak 283 bidang, terdiri atas K1= 132 bidang, K2= 8 bidang dan K3= 143 bidang.
- 6) Pada Bulan Desember 2025 terdapat tambahan realisasi sebanyak 158 bidang, sehingga total realisasi s.d. Desember yaitu sebanyak 374 bidang, atau 132,16% dari target tahunan.
- 7) Pengukuran evaluasi kinerja portfolio BMN pada satuan kerja tahun 2025 yaitu jumlah rekomendasi sebanyak 72 NUP dan tindak lanjut rekomendasi sebanyak 4 NUP.
- 8) Realisasi pengukuran evaluasi kinerja portfolio sampai dengan Desember 2025 sudah terdapat realisasi sebesar 116,94 % dan capaian sebesar 116,94% dengan rincian jumlah rekomendasi sebanyak 82 NUP dan tindak lanjut dari satker sebanyak 28 NUP.
- 9) Target satker yaitu:

a. BPLJSKB : 20 NUP	e. MTSN 4 Bekasi : 11 NUP
b. BPPTIK : 14 NUP	f. Lapas Kelas II A Bekasi : 10 Nup
c. KPPN : 6 NUP	g. KPP Bekasi Utara: 3 NUP
d. MTSN Cikarang : 10 NUP	h. Kanwil DJP Jawa Barat : 8 NUP

c. Seksi Piutang Negara

- 1) Realisasi IKU untuk PNBPN s.d. 31 Desember 2025 tercapai sebesar Rp29.288.849,00 atau sebesar 195,26% secara perolehan per target Desember 2025 dengan capaian 120%, dan secara YoY realisasi PNBPN telah mencapai 195,26%.
- 2) Realisasi IKU untuk Penurunan Saldo PN s.d. 1 Desember 2025 tercapai sebesar Rp2.331.670.818,31 atau sebesar 172,72% secara perolehan per target Desember 2025, dan secara YoY realisasi Penurunan Saldo PN telah mencapai 172,72%.
- 3) Pada triwulan IV telah dilakukan edukom PN dengan nilai 96.1, sehingga mendapatkan capaian sampai dengan bulan Desember 2025 yaitu 95.93
- 4) Realisasi IKU untuk Penyelesaian BKPN s.d. 31 Desember 2025 sebesar 34 BKPN dengan perhitungan bobot atau sebesar 38 dengan perhitungan 118,75% secara perolehan per target Desember 2025 atau capaian 120%, dan secara YoY capaian telah mencapai 118,75%.

d. Seksi Hukum dan Informasi

- 1) Realisasi capaian penanganan permasalahan hukum sampai Desember 2025 sebesar 112,06 diperoleh dari :
 Jumlah indeks permasalahan hukum di pengadilan sebanyak 44 perkara dengan realisasi sebesar 109,22%
 Jumlah indeks perkara berkekuatan hukum tetap sebanyak 56 perkara dengan realisasi sebesar 123,41%
 Formula realisasi capaian = $(80\% \times 109,22\%) + (20\% \times 123,41\%) = 112,06\%$
 Untuk memperoleh komponen indeks putusan perkara berkekuatan hukum tetap memerlukan waktu yang lama.
 Terdapat beberapa perkara yang sebenarnya tidak berkaitan dengan KPKNL namun karena KPKNL ditarik sebagai pihak apabila hasil putusan kalah maka

nilai IKU menjadi rendah (misal : belum ada permohonan lelang, sengketa antara debitur dan pihak ketiga).

Terdapat perkara yang diajukan banding namun Pembanding tidak mengajukan Memori Banding sehingga KPKNL tidak dapat mengajukan Kontra Memori Banding yang mengakibatkan tidak adanya realisasi.

Putusan sudah terbit namun amar putusan dan Salinan putusan belum tersedia sehingga belum dapat menghitung capaian.

- 2) Peningkatan efektivitas penyediaan layanan data/informasi publik bagi masyarakat umum mengenai Kemenkeu, implikasinya adalah bahwa informasi terkait kebijakan, tujuan dan program pengelolaan keuangan dan kekayaan negara melalui kampanye komunikasi yang efektif, tepat sasaran dan berdampak terhadap peningkatan pengetahuan, dukungan, dan partisipasi publik tersampaikan kepada masyarakat luas. Capaian s.d Desember 2025 sebesar 116 diperoleh dari :

Indek Ketepatan waktu penyediaan dan pemutakhiran informasi publik pada website : 110

Indeks Ketepatan waktu penyampaian informasi publik atas permintaan informasi publik dari pengguna layanan : 120

Capaian IKU = $(60\% \times 120) + (40\% \times 110) = 116$

e. Seksi Kepatuhan Internal

- 1) Terdapat perubahan manual IKU Indeks Integritas berdasarkan ND Sekretariat DJKN nomor ND-2918/KN.1/2025 tanggal 16 September 2025. Perubahannya yaitu pada triwulan IV hal yang dinilai adalah Indeks Integritas Murni + Apresiasi. Sedangkan triwulan I s.d. III Penilaian Indeks Integritas diukur dari tindak lanjut rencana aksi perbaikan atas hasil Survei Penilaian Integritas tahun 2024. Rencana aksi s.d. Triwulan IV telah ditindaklanjuti dan disampaikan kepada Kanwil DJKN Jawa Barat. Realisasi IKU sampai dengan Triwulan IV didapat dari hasil pengolahan survei SPI dari Kantor Pusat, yaitu sebesar 105,32.

Implikasinya:

- a) Diperlukan penguatan monitoring dan evaluasi internal untuk memastikan konsistensi dan efektivitas tindak lanjut.
- b) Pelaksanaan rencana aksi tersebut sebagai langkah perbaikan penilaian SPI 2025

- 2) Pada Triwulan III, telah dilakukan penyebaran survei IKPL menggunakan e-SKPL yang dikelola langsung oleh Biro Organta Setjen. Didapat Hasil e-SKPL KPKNL Bekasi Triwulan IV: 4,96 (skala 5).

konversi ke skala 100:

$$4,96 * 20 = 99,2$$

Sehingga Nilai e-SKPL KPKNL Bekasi Triwulan IV: 99,2

Rata-rata nilai e-SKPL dari Triwulan I – Triwulan IV yaitu 96,64

Implikasi: Semua unit mengikuti format dan sistem yang sama, namun data tidak realtime

- 3) Aspek pengukuran kualitas implementasi manajemen kinerja dan risiko dibagi menjadi 3 yaitu Kinerja Organisasi, Kinerja Pegawai dan Risiko Realisasi Indeks Kinerja Organisasi s.d. Triwulan IV yaitu 99,93 sedangkan Indeks Kualitas Manajemen Risiko yaitu 99,52. Untuk Indeks Kinerja Pegawai sebesar 97,93

Implikasi: Keterlambatan dalam merespon perubahan, menyebabkan pengelolaan kinerja dan risiko menjadi tidak relevan, beban kerja meningkat dan Realisasi menunggu dari hasil reuiv Kanwil DJKN Jawa Barat

- 4) Sehubungan dengan belum optimalnya penghapusan IKU ini pada PK (melalui addendum), terdapat Nota Dinas Sekretariat DJKN dan Sosialisasi yang menyampaikan terkait revisi Manual IKU ini.
Sampai dengan Triwulan IV, KPKNL Bekasi telah menyampaikan laporan dokumentasi kegiatan monev ZI, melalui link yang telah disediakan Bagian Kepatuhan Internal Sekretariat DJKN sebelum tanggal 22 Desember 2025, sehingga didapatkan realisasi sebesar 120.
Implikasi: memperhatikan komponen penilaian untuk capaian IKU tersebut, kegiatan pelaksanaan dan pendokumentasian Monev Keberlanjutan ZI WBK/WBBM tahun 2025 tetap dilanjutkan.

f. Pelayanan Lelang

- 1) Capaian PNPB Lelang s.d. 31 Desember 2025 sebesar Rp20,288,429,118.00. Capaian ini disebabkan belum adanya lelang besar yang laku (*wind fall*), lelang besar masih dalam proses pemasaran dan kemungkinan baru akan laku di tahun 2026.
- 2) Capaian Pokok lelang s.d. 31 Desember 2025 sebesar Rp 623,663,192,671 tercapai sebesar 78,13% apabila dibandingkan dengan target Q4 sebesar Rp 798,202,500,000.

	Target 2025	Realisasi	%tase
Pegadaian	Rp267,323,500,000.00	Rp276.080.572.800,00	103, 28%
PL I	Rp530,879,000,000.00	Rp347.582.619.871,00	65, 47%
Total	Rp798,202,500,000.00	Rp623.663.192.671,00	78,13%

- 3) Pada triwulan IV telah dilakukan edukom Lelang dengan nilai 96.6, sehingga mendapatkan capaian sampai dengan bulan Desember 2025 yaitu 80.13
- 4) Lelang Hak Tanggungan, pailit produktivitas masih rendah dan lelang barang tetap berupa tanah memiliki produktivitas yang rendah
Persentase Produktivitas Lelang pada di bulan Desember 2025 berada di angka 136,66% dari target Q4 sebesar 80%.
Implikasi:
Persentase produktivitas lelang tercapai (tidak dipengaruhi jenis lelang HT secara signifikan), dari frekuensi lelang sebanyak 2.979 sebanyak 557 yang laku terjual atau sebesar 18,7 %.

g. Pelayanan Penilaian

- 1) Masih terbatasnya permodelan untuk penilaian properti.
Implikasi:
Penyelesaian permohonan penilaian belum dapat dilakukan dengan cepat, khususnya pada saat terdapat permohonan penilaian yang masuk secara bersamaan.
Rincian Capaian dan Realisasi :
 1. Komponen Norma Waktu Layanan Penilaian (40%)
Rata-Rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian = 106,80%
 2. Komponen Akurasi Data Layanan Penilaian (30%)
Jumlah Pelaksanaan Penilaian BMN yang telah diinput pada SIP = 91

Jumlah Permohonan Penilaian BMN yang diterima pada Satu Kemenkeu/SIMAN = 60

3. Komponen Nilai Hasil Kaji Ulang (30%)

% Jumlah Laporan Penilaian yang mendapat hasil Kaji Ulang minimal 85 = 100%

Jumlah Laporan Penilaian yang mendapat hasil Kaji Ulang minimal 85 = 72

Jumlah seluruh Laporan Penilaian yang sudah dilakukan Kaji Ulang = 72

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Jumlah pegawai di KPKNL Bekasi adalah sebanyak 37 orang.

Berkenaan dengan efisiensi penggunaan Sumber Daya pada KPKNL Bekasi dalam rangka pembinaan di kepegawaian, berdasarkan data dan usulan ke Kantor Pusat per 31 Desember 2025, dapat disampaikan sebagai berikut:

- a. Kenaikan pangkat : 7 orang
- b. Kenaikan Gaji Berkala : 19 orang
- c. Ijin belajar : 0 orang
- d. Pegawai pensiun : 3 orang
- e. Pegawai mengikuti diklat : 12 orang

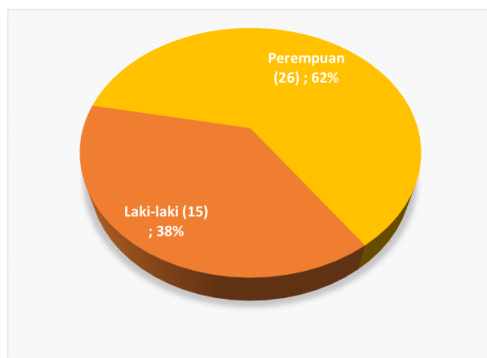


Data Statistik Kepegawaian KPKNL Bekasi

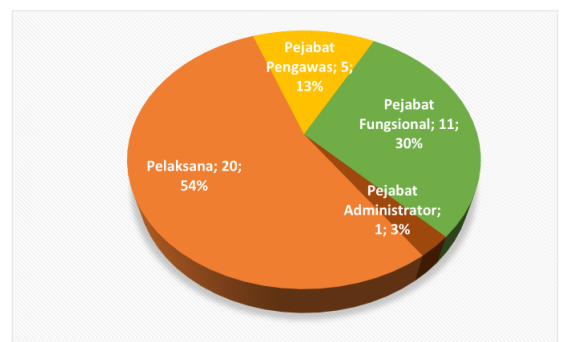
Per 31 Desember 2025

Jumlah Pegawai: 37 orang

Berdasarkan Jenis Kelamin



Berdasarkan Jabatan



6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

a. Subbagian Umum

Pada seksi Hukum dan Informasi, hal yang mendukung tercapainya rencana/target atau alasan tidak tercapainya target sebagai berikut:

- 1) Kerjasama antar lini (antara atasan dengan bawahan, maupun antar seksi) di internal KPKNL Bekasi sangat mempengaruhi tercapainya target pada Subbagian Umum;
- 2) Dukungan sarana dan prasarana pada KPKNL Bekasi sangat menunjang kelancaran proses pencapaian target;

Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil antara lain:

- 1) Subbagian Umum berusaha meningkatkan kinerja dengan baik;
- 2) Berkoordinasi dengan seksi-seksi lain terkait pembiayaan guna pencapaian kinerja organisasi

b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

Pada Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara hal yang mendukung tercapainya rencana/target atau alasan tidak tercapainya target sebagai berikut:

- 1) Kerjasama antar lini (antara atasan dengan bawahan, maupun antar seksi) di internal KPKNL Bekasi sangat mempengaruhi tercapainya target pada Seksi PKN;
- 2) Dukungan sarana dan prasarana pada KPKNL Bekasi sangat menunjang kelancaran proses pencapaian target;
- 3) Koordinasi dan kerjasama yang intensif dengan stakeholders;
- 4) Pemberian pemahaman terhadap satuan kerja melalui sosialisasi kebijakan Pengelolaan/Penatausahaan BMN dan bimbingan teknis aplikasi SIMAK BMN, Persediaan, SIMAN, SiMantap.

Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil antara lain:

- 1) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan *stakeholders*;
- 2) Menjadikan sarana media sosial (*Whatsapp Group*) sebagai saluran informasi dan penyampaian kendala bagi dan dari satuan kerja; dan
- 3) Pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis yang berkesinambungan kepada satuan kerja, terutama peraturan-peraturan/kebijakan-kebijakan yang baru terkait pengelolaan/penatausahaan BMN termasuk dalam hal Revaluasi BMN.

c. Seksi Piutang Negara

Pada Seksi Piutang Negara, hal yang mendukung tercapainya rencana/target atau alasan tidak tercapainya target sebagai berikut:

- 1) Kerjasama antar lini (antara atasan dengan bawahan, maupun antar seksi) di internal KPKNL sangat mempengaruhi tercapainya target pada Seksi PN;
- 2) Dukungan sarana dan prasarana pada KPKNL Bekasi sangat menunjang kelancaran proses pencapaian target;
- 3) Koordinasi dan kerjasama yang intensif dengan stakeholders penyerah piutang;

Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil antara lain:

- 1) Selalu memberikan pembinaan dan pengarahan serta dukungan dan penghargaan kepada para pegawai sehingga semangat dan motivasi untuk berkinerja baik selalu terjaga;

- 2) Selalu mengikutkan pegawai apabila ada kegiatan diklat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM di bidang Piutang Negara;
- 3) Penggalian potensi piutang, dengan cara melakukan sosialisasi ke instansi/lembaga pemerintah di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.

d. Seksi Hukum dan Informasi

Pada seksi Hukum dan Informasi, hal yang mendukung tercapainya rencana/target atau alasan tidak tercapainya target sebagai berikut:

- 1) Kerjasama antar lini (antara atasan dengan bawahan, maupun antar seksi) di internal KPKNL Bekasi sangat mempengaruhi tercapainya target pada Seksi Hukum dan Informasi;
- 2) Dukungan sarana dan prasarana pada KPKNL Bekasi sangat menunjang kelancaran proses pencapaian target;

Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil antara lain:

- 1) Seksi Hukum dan Informasi berusaha meningkatkan kinerja dengan baik;
- 2) Berkoordinasi dengan Subbagian Umum guna membiayai biaya-biaya atas pengambilan putusan perkara pengadilan; dan
- 3) Berkoordinasi antar Seksi terutama seksi Pelayanan Lelang dan Piutang Negara untuk melakukan kerja sama terkait penanganan perkara pada KPKNL Bekasi.

e. Seksi Kepatuhan Internal

Pada seksi Kepatuhan Internal, hal yang mendukung tercapainya rencana/target atau alasan tidak tercapainya target sebagai berikut:

- 1) Kerjasama antar lini (antara atasan dengan bawahan, maupun antar seksi) di internal KPKNL Bekasi sangat mempengaruhi tercapainya target pada Seksi Hukum dan Informasi;
- 2) Dukungan sarana dan prasarana pada KPKNL Bekasi sangat menunjang kelancaran proses pencapaian target.

Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil antara lain:

- 1) Meningkatkan kompetensi SDM untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan/workshop;
- 2) Internalisasi atas tugas dan fungsi Unit Kepatuhan Internal seperti contoh Manajemen Risiko, Pengendalian Internal, Pemantauan Gratifikasi, Pengelolaan Kinerja, dll.;
- 3) Melakukan koordinasi dan diskusi dengan Bidang KIH Kanwil DJKN Jawa Barat dan Bagian OKI Kantor Pusat DJKN;

f. Seksi Pelayanan Lelang

Pada Seksi Pelayanan Lelang, hal yang mendukung tercapainya rencana/target atau alasan tidak tercapainya target sebagai berikut:

- 1) Kerjasama antar lini (antara atasan dengan bawahan, pejabat fungsional Pelelang, dan antar Seksi/Subbagian di internal KPKNL) sangat mempengaruhi tercapainya target pada Seksi Pelayanan lelang;

- 2) Dukungan sarana dan prasarana pada KPKNL Bekasi sangat menunjang kelancaran proses pencapaian target;
- 3) Koordinasi dan kerjasama yang intensif, serta pelayanan prima kepada stakeholders pengguna jasa Lelang;
- 4) Kondisi Pasar atau daya beli masyarakat yang rendah, barang yang kurang marketable dan limit yang tinggi merupakan beberapa alasan tidak tercapainya target/rencana seksi lelang.

Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil antara lain:

- 1) Memberikan sosialisasi dan publikasi terkait lelang kepada pengguna jasa lelang baik kepada pemohon maupun peminat lelang agar mereka mengenal serta memahami sistem penjualan secara lelang melalui aplikasi *e-auction* yang mempunyai banyak keunggulan dibanding sistem manual/dengan kehadiran;
- 2) Mengadakan *Focus Group Discussion* dengan para *stakeholder* pemohon lelang terkait penetapan nilai limit yang wajar dan peningkatan pemasaran terhadap objek lelang.
- 3) Melakukan kunjungan/pertemuan resmi dengan para *stakeholder* di wilayah kerja agar terjalin hubungan dan kerjasama yang lebih baik dalam pelayanan lelang.

g. Seksi Pelayanan Penilaian

Pada Seksi Pelayanan Penilaian, hal yang mendukung tercapainya rencana/target atau alasan tidak tercapainya target sebagai berikut:

- 1) Kerjasama antar seksi dalam internal KPKNL terutama dengan seksi PKN sangat mempengaruhi tercapainya target pada Seksi Pelayanan Penilaian;
- 2) Dukungan sarana dan prasarana pada KPKNL Bekasi sangat menunjang kelancaran proses pencapaian target;

Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil antara lain:

- 1) Koordinasi yang intensif dengan Kanwil DJKN Jabar dan Direktorat Penilaian
- 2) Koordinasi dan kerjasama yang intensif dengan stakeholders;
- 3) Membuat program kegiatan pembentukan data pembanding.

7. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

a. Rendahnya nominal lelang laku terjual

Realisasi pokok lelang didominasi oleh lelang laku dengan nominal relative kecil dibawah 1 milyar. Jumlah frekuensi lelang laku dengan nominal harga lelang diatas Rp 1M sd. 31 Desember 2025 yaitu sebanyak 94 frekuensi, sehingga level kemungkinannya hampir pasti terjadi.

Capaian pokok lelang jika dibandingkan dengan target tahunan yaitu baru 65,47%, sehingga berdampak signifikan terhadap kinerja.

Mitigasi yang telah dilaksanakan:

- 1) Berkoordinasi dengan pemohon lelang khususnya hak tanggungan dan Kurator agar melakukan lelang ulang dan memasarkan asset-asset besar agar laku terjual melalui lelang

2) Melakukan edukasi terkait dengan adanya alamat website yang baru

b. Rendahnya Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara

Debitur yang didatangi masih diperlukan konfirmasi lebih lanjut karena pada saat mendatangi rumah dalam keadaan kosong maupun sedang pergi. Lebih lanjut, ditargetkan pengembalian beberapa BKPN ke Penyerah Piutang dan PSBDT.

Sampai dengan 31 Desember 2025, penyelesaian BKPN sebesar 34 dengan perhitungan bobot sebesar 38 yakni 118,75% secara perolehan per target Desember 2025 atau capaian 120%, dan secara YoY telah mencapai 118,75% sehingga risiko ini berdampak tidak signifikan terhadap kinerja.

Sedangkan Jumlah debitur yang melakukan pelunasan sampai dengan 31 Desember 2025 hanya sebanyak 6 debitur, diatas batas aman IRU Triwulan IV sehingga risiko hampir pasti terjadi.

Mitigasi yang telah dilaksanakan:

Intensifikasi penagihan debitur, komunikasi dengan instansi terkait, *debt and asset tracing*.

c. Adanya pembatalan lelang

Dari 2.531 pelaksanaan lelang s.d. Desember 2025, terdapat sebanyak 512 permohonan lelang dibatalkan (20,23%) atau berada diatas batas atas IRU Triwulan IV, sehingga kemungkinan risiko ini sering terjadi.

Hal tersebut disebabkan karena:

- 1) Dibatalkan oleh penjual karena pelunasan
- 2) Dibatalkan oleh Pelelang karena tidak memenuhi syarat formil dokumen pelaksanaan lelang. Seperti SKPT tidak terbit, kesalahan pengumuman dan lain-lain.

Mitigasi yang telah dilaksanakan:

- 1) Berkoordinasi dengan pemohon lelang khususnya hak tanggungan dan Kurator agar melakukan lelang ulang dan memasarkan asset-asset besar agar laku terjual melalui lelang
- 2) Melakukan edukasi terkait dengan adanya alamat website yang baru

d. Pelaksanaan pengerjaan konstruksi/ renovasi yang terlambat/ tidak sesuai jadwal/ ketentuan/ kontrak batal

Rencana Pemeliharaan Pekerjaan dilaksanakan sampai bulan Desember 2025, dan telah dilengkapi dengan jaminan pemeliharaan, maka besaran risiko masih tetap pada level rendah dan berdampak moderat

Mitigasi yang Telah Dilaksanakan:

Melakukan rapat rapat persiapan, penyusunan dan pembahasan rencana pengadaan barang dan jasa (PBJ) TA 2025 yang dihadiri oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), PPSPM, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan (PBJ) dan Staf PPK KPKNL Bekasi

e. Adanya lelang laku dengan nominal besar (Lelang *Booming*)

Sampai dengan bulan Desember 2025, belum terdapat lelang laku dengan nominal diatas Rp 20M, atau berada dibawah batas bawah IRU Triwulan IV, sehingga kemungkinan hampir tidak terjadi.

Lelang laku nominal besar diatas Rp20M berdampak signifikan karena dapat mempengaruhi kinerja sebesar 20%

Mitigasi yang telah dilaksanakan:

Melakukan koordinasi dengan pemohon lelang dengan asset diatas 20 M

- f. Kurang optimalnya implementasi rencana kerja keberlanjutan ZI-WBK/WBBM Realisasi Triwulan IV telah tercapai karena Penyampaian laporan kegiatan keberlanjutan ZI WBK/WBBM telah dipenuhi. Dengan terpenuhinya target Triwulan IV dan pelaksanaan implementasi keberlanjutan ZI yang masih sesuai dengan rencana kerja, maka level kemungkinan menjadi turun ke level jarang terjadi.

Mitigasi yang telah dilaksanakan:

- 1) Penetapan SK Tim keberlanjutan ZI WBK/WBBM
- 2) Penetapan Agen Perubahan dan program perubahannya
- 3) Penetapan rencana kerja tim pokja
- 4) Monitoring dan Evaluasi keberlanjutan ZI WBK/WBBM

- g. BMN Berupa Tanah Tidak Dilengkapi Dokumen Kepemilikan (Sertipikat Hak Pakai) Total target sertifikasi pada KPKNL Bekasi sebanyak 283 bidang, terdiri atas K1= 132 bidang, K2= 8 bidang dan K3= 143 bidang. Dengan tercapainya realisasi IKU sertifikasi sebesar 132.16% dari target 100%, sehingga risiko ini berdampak moderat. Sampai dengan Desember, realisasi K1 mencapai 200 bidang, atau sebesar 151,52% dari target K1, sehingga level kemungkinannya sering terjadi.

Mitigasi yang telah dilaksanakan:

- 1) Rapat dan koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota dan Kabupaten Bekasi
- 2) Rapat dan koordinasi dengan Satuan Kerja
- 3) Koordinasi dengan Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat

- h. *Ownership* pegawai terhadap organisasi Level kemungkinan risiko ini jarang terjadi karena dalam 12 bulan terakhir dan sampai dengan Tw IV, Tidak terdapat pegawai yang dikenakan hukuman disiplin. Namun terdapat aduan 1 Wise dan SP4n Lapor, sehingga risiko ini berdampak moderat untuk reputasi unit.

Mitigasi yang telah dilaksanakan:

Melakukan kegiatan bersama dengan tajuk Galang Semangat Pagi (GSP) selama 2x dalam sebulan, yang berisi kebulatan tekad untuk kemajuan organisasi dan memperbaiki layanan kepada masyarakat

- i. Kesalahan berulang terhadap prosedur ataupun dokumen Level kemungkinan risiko ini sering terjadi karena pada pemantauan LHPPU 2024, terdapat 8 Naskah dinas permintaan kelengkapan berkas dari 30 surat persetujuan Sewa BMN, atau sebesar 26,6% Terdapat kesalahan prosedur pada proses bisnis penilaian, namun bukan kesalahan berulang dan belum adanya perangkat pemantauan, sehingga masih berdampak minor.

Mitigasi yang telah dilaksanakan:

- 1) Melakukan monitoring secara acak dan manual
- 2) Mengikuti sosialisasi terkait pemantauan tahunan yang diselenggarakan Sekretariat DJKN

- j. Optimalisasi penggunaan BMN underutilized belum terlaksana sesuai rencana Level kemungkinan risiko ini sering terjadi karena nilai sbks yang *underutilized* 2024 sebesar 30 NUP aset dari jumlah total 136 NUP (22%). Total target optimalisasi penggunaan BMN pada KPKNL Bekasi sebanyak 11 NUP.

Target optimalisasi penggunaan BMN Tahun 2025 terkendala karena belum banyak satker yang memahami cara optimalisasi BMN yang berada dalam kewenangannya baik penggunaan maupun pemanfaatan.

Capaian IKU tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara s.d. Triwulan IV yaitu 137,58% sehingga risiko ini berdampak minor.

Mitigasi yang telah dilaksanakan:

- 1) Melakukan koordinasi pendataan optimalisasi aset pada Satker yang menjadi target NUP dan sudah dilakukan pada Satker Lapas Kelas IIA Bekasi dan KPP Pratama Bekasi Utara.
- 2) Melakukan perhitungan dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Satker terkait.

k. Piutang negara yang di setor rendah

Pengakuan atas ketidakmampuan debitur akan membayar hutangnya langsung secara penuh menyebabkan hal ini sering terjadi, terlebih jika debitur bersangkutan tidak memiliki sanak keluarga yang dapat menanggung.

Sampai dengan 31 Desember 2025, terdapat 6 BKPN yang mengangsur dengan rincian 4 BKPN dengan angsuran Rp900 rb s.d Rp5 juta, 1 BKPN sisanya dengan angsuran Rp5 juta s.d Rp15 juta, dan 1 BKPN dengan angsuran lebih dari Rp19 juta. Capaian penurunan nilai saldo piutang negara s.d. Triwulan IV yaitu 118,75%, sehingga risiko ini berdampak minor.

Mitigasi yang telah dilaksanakan

Penagihan debitur dengan pendekatan kekeluargaan maupun agama

l. Adanya pelaksanaan pemanfaatan BMN K/L yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Total usulan pemanfaatan BMN pada KPKNL Bekasi sebanyak 8 NUP dari total tersebut pada Semester I 2025 terdapat 2 satker yang membatalkan pemanfaatan BMN.

Level kemungkinan risiko ini kadang terjadi karena dari data persetujuan Semester I 2025 ada 2 satker atau sekitar 3,29% dari total 61 satker yang menjadi kewenangan KPKNL yang membatalkan pemanfaatan dan perlu dilakukan pemantauan apakah masih dilakukan pemanfaatan atau tidak.

Realisasi kinerja PNBP sampai dengan Triwulan IV 2025 sebesar Rp15,069,257,247.00 dari target sebesar Rp8,100,000,000.00, sehingga berdampak minor.

Mitigasi yang telah dilaksanakan:

- 1) Menyelesaikan dengan cepat persetujuan sewa dalam rangka meningkatkan optimalisasi penerimaan negara dan pemanfaatan BMN
- 2) Melakukan koordinasi dengan satker yang melakukan pemanfaatan namun belum mengajukan persetujuan pemanfaatan BMN.

m. Satker tidak menyampaikan feedback/action plan atas rekomendasi KPKNL

Level kemungkinan risiko ini kadang terjadi karena sampai triwulan IV tahun 2025, berdasarkan hasil pemantauan atau kunjungan lapangan belum terdapat pemanfaatan baru tanpa adanya persetujuan menteri keuangan.

Target optimalisasi penggunaan BMN Tahun 2025 terkendala karena data biaya operasional dan pemeliharaan BMN harus menunggu dari satker serta terdapat tahapan tambahan seperti verifikasi kanwil dan menunggu tindak lanjut atas rekomendasi dari Satker sebagai capaian.

Capaian IKU evaluasi kinerja BMN telah mencapai 116,94% sehingga berdampak minor untuk kinerja.

Mitigasi yang telah dilaksanakan:

Menyampaikan laporan portofolio kepada Satker BPPTIK, MTsN Cikarang, Lapas Kelas II Bekasi, KPP Bekasi Utara, MTsN 4 Bekasi, dan BPLJSKB,

- n. Pembagian lelang dan jenis lelang yang tidak merata
Level kemungkinan risiko ini **hampir pasti terjadi** karena lelang didominasi oleh jenis lelang Hak Tanggungan (s.d. Triwulan IV terdapat 2.982 lot lelang HT dari 3,348 lot lelang keseluruhan atau 89%) .

Pembagian permohonan lelang dan jenis lelang mengikuti arestasi, dengan penyesuaian untuk menjaga pemerataan beban kerja pelelang.

Dengan perhitungan baru produktivitas lelang, Pada KPKNL Bekasi s.d. Triwulan IV, capaian lot IKU lelang noneksekusi wajib, eksekusi Hak Tanggungan, Pailit, dan pengadilan serta lelang eksekusi selain Hak Tanggungan, Pailit, dan pengadilan masing-masing mencapai 120%. Sehingga risiko ini berdampak **tidak signifikan** untuk kinerja.

Mitigasi yang telah dilaksanakan:

- 1) Melakukan pembagian lelang sesuai arestasi
- 2) Menurunkan/menaikan diluar arestasi agar beban kerja pelelang bisa seimbang/merata

- o. Adanya keluhan/aduan layanan yang belum selesai ditindaklanjuti
Level kemungkinan risiko ini **jarang terjadi** karena Januari – Desember 2025 Terdapat 1 aduan Wise terkait lelang, 1 SP4n Lapor dan 1 aduan melalui Media Sosial. Seluruh aduan tersebut telah ditindaklanjuti dengan segera. Realisasi IKU IKPL s.d. Triwulan IV yaitu 96.64 dari target 77, didapatkan capaian sebesar 125.50 % sehingga berdampak **minor**.

Mitigasi yang telah dilaksanakan:

- 1) Terdapat 1 (satu) aduan WISE terkait lelang, dan sudah ditindaklanjuti melalui naskah dinas kepada Sekretariat DJKN
- 2) Aduan media sosial telah ditindaklanjuti melalui WA Care

- p. Adanya putusan pengadilan yang mengabulkan tuntutan penggugat
Level kemungkinan risiko ini **jarang terjadi**, karena berdasarkan data sementara perkara yang ada terdapat 100 perkara. Dari 100 perkara tersebut sebanyak 44 perkara masih dalam proses pemeriksaan pengadilan dan sebanyak 56 perkara telah berkekuatan hukum tetap. Dari 56 perkara terdapat 2 perkara yang putusannya mengabulkan tuntutan Penggugat.

Realisasi capaian IKU Perkara triwulan IV sebesar 112,06% telah melampaui target yang ditetapkan sehingga berdampak **minor** untuk kinerja

Mitigasi yang telah dilaksanakan:

- 1) Berkoordinasi dengan Direktorat Huhu untuk penanganan perkara yang terkait dengan kebijakan / PMK
- 2) Melakukan penanganan perkara secara efektif dan efisien

- q. Penyampaian laporan penilaian yang melebihi batas waktu
Kemungkinan Risiko laporan yang melebihi batas waktu **jarang terjadi**, sehingga berdampak **minor**.

Mitigasi yang telah dilaksanakan:

- 1) Koordinasi dengan pemohon penilaian.
 - 2) Memperhatikan batas waktu penyampaian laporan penilaian pada database penilaian.
- r. Ketidaksesuaian antara Pengelolaan kinerja dengan RKA-K/L dan dokumen perencanaan lainnya
Level kemungkinan dilihat dari Target dan realisasi capaian output pada seksi teknis sampai dengan triwulan IV telah sesuai dengan daftar isian pelaksanaan anggaran, **jarang terjadi**. Capaian IKU IKA telah melewati target yaitu 120% sehingga berdampak **minor** untuk kinerja
- Mitigasi yang telah dilaksanakan:
Menyampaikan nota dinas kepada setiap seksi dan subbagian umum untuk Menyusun Rencana Penarikan Dana dan Target Capaian Output di Tahun 2025
- s. Rendahnya minat pegawai mengikuti diklat
Seluruh Pegawai yang telah memenuhi 25 (dua puluh lima) jam pelatihan dengan minimal 1 (satu) pembelajaran sesuai tusi masing-masing pegawai, dapat dikatakan kemungkinannya **jarang terjadi**. Kurangnya minat pegawai terhadap pembelajaran, ini ditunjukkan dengan tidak ditindaklanjuti program-program Individual Development Planning (IDP), dengan cara mendaftarkan diri di aplikasi diklat DJKN.
Dengan adanya pembaruan perhitungan IKU, ada kriteria lain, yaitu bintal dan budaya, risiko ini berdampak **minor**.
- Mitigasi yang telah dilaksanakan:
Menyampaikan imbauan kepada para pegawai untuk mendaftarkan diri mengikuti diklat, dan melaksanakan rencana pengembangan kompetensi diri yang telah dicatat di Form Individual Development Program (IDP) TA 2025.
- t. Ketidaktepatan Waktu Tindak Lanjut Permintaan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana DJKN
Berdasarkan data triwulan IV tahun 2025 permintaan informasi dari pengguna layanan yang masuk telah ditanggapi secara tepat waktu, sehingga risiko ini jarang terjadi dan memperoleh indek capaian sebesar 120 (sangat tepat waktu) dan untuk pemutakhiran pada website telah dilakukan dengan tepat waktu sehingga memperoleh capaian sebesar 110, oleh karena itu total capaian IKU ini sebesar 116. Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk tindak lanjut PPID sebelumnya yaitu 5 hari dan didukung pegawai yang saling bersinergi dan kompeten, sehingga berdampak **minor** untuk reputasi organisasi.
- Mitigasi yang telah dilaksanakan:
- 1) Menyampaikan laporan PPID tepat waktu
 - 2) Melakukan penyediaan dan pemutakhiran informasi pada website
 - 3) Memberikan informasi publik kepada Pemohon informasi tepat waktu
- u. Kinerja individu pegawai tidak mendukung tercapainya kinerja unit/organisasi
Berdasarkan Keputusan KPKNL Bekasi, terkait kinerja pegawai tahun 2024, terdapat 1 pegawai yang berkinerja butuh perbaikan dan 1 pegawai berkinerja baik, sehingga level kemungkinannya **jarang terjadi**.
Kinerja Individu/IKI pada setiap pegawai telah dicek agar berkualitas dan dapat mendukung tercapainya kinerja organisasi. Salah satunya dengan memasukkan IKU CP yaitu terkait keberlanjutan WBBM, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Selain itu, NKO KPKNL Bekasi diatas 100 sehingga kinerja individu berdampak **minor** untuk kinerja organisasi.

Mitigasi yang telah dilaksanakan:

Menyampaikan nota dinas kepada seluruh pegawai KPKNL Bekasi agar menyampaikan Form Capaian Kinerja Individu secara berkala setiap bulannya di TA 2025

8. Rekomendasi rencana aksi

a. Subbagian Umum

1. Terkait dengan kualitas kerja anggaran rekomendasi rencana aksi berupa:
 - 1) Terus melakukan koordinasi secara berkala dengan KPPN Bekasi dan Kanwil Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat terkait pelaksanaan anggaran.
 - 2) Melakukan koordinasi dengan Seksi Teknis terkait kebutuhan penarikan anggaran bulanan dan capaian output yang ditargetkan dalam DIPA
 - 3) Melakukan Revisi POK sesuai usulan dari seksi dan subbag umum
2. Terkait dengan tata Kelola pengadaan barang dan jasa rekomendasi rencana aksi berupa:
 - 1) Melakukan PBJ berupa Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan KPKNL Bekasi TA 2025
 - 2) Melakukan PBJ berupa Belanja Modal Fasilitas Perkantoran KPKNL Bekasi TA 2025 dan kelengkapan di ruang e-auction
3. Terkait dengan pengembangan kompetensi pegawai rekomendasi rencana aksi berupa mengusulkan nama-nama pegawai untuk mengikuti diklat yang sesuai dengan pendidikan yang dimiliki serta mengingatkan kembali untuk mengikuti diklat

b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

1. Terkait realisasi penerimaan negara, rekomendasi rencana aksi berupa:
 - 1) Melakukan koordinasi dengan satker BLU terkait PNBPN yang berasal dari BLU.
 - 2) Berkoordinasi dengan satker terkait aset yang berpotensi untuk dilakukan pemanfaatan.
 - 3) Melakukan koordinasi dengan satker terkait aset yang dipindahtanggankan (KPU Kota Bekasi dan KPU Kab. Bekasi)
2. Terkait dengan optimalisasi pengelolaan aset negara, rekomendasi rencana aksi berupa:
 - 1) Pengumpulan data baik dengan peninjauan lapangan maupun dengan berkomunikasi dengan PIC Satker
 - 2) Penyusunan laporan untuk disampaikan kepada Kanwil DJKN Jawa Barat dan berkoordinasi terkait BMN yang terdapat penggabungan NUP.
 - 3) Melakukan survey lapangan ke Satker yang menjadi target.
3. Terkait dengan BMN berupa tanah yang disertifikatkan, rekomendasi rencana aksi berupa:
 - 1) Koordinasi dengan Kantor Pertanahan terkait progres penyampaian berkas sertipikasi oleh Satker
 - 2) Koordinasi dengan satker terkait kendala proses sertipikasi

4. Terkait dengan evaluasi kinerja BMN, rekomendasi rencana aksi berupa:
 - 1) Berkoordinasi dengan satker yang menjadi objek evaluasi kinerja untuk meminta data yang belum dikirimkan.
 - 2) Menyelesaikan laporan evaluasi kinerja BMN Satker Kanwil DJP Jawa Barat.
 - 3) Menyelesaikan laporan evaluasi kinerja BMN Satker KPPN Bekasi
5. Terkait dengan kepuasan pengguna layanan, rekomendasi rencana aksi berupa menyebarkan kuesioner kepada stakeholder setiap triwulan

c. Seksi Piutang Negara

1. Terkait realisasi penerimaan negara, rekomendasi rencana aksi berupa meningkatkan pengurusan sampai ke tahap Lelang bagi debitur yang barang jaminan/Harta Kekayaan Lainnya telah ditemukan.
2. Terkait realisasi penurunan nilai saldo piutang negara, rekomendasi rencana aksi berupa:
 - 1) Mengajukan permohonan Lelang untuk debitur Kho Soe Hiong.
 - 2) Pengembalian BKPN ke Penyerah Piutang; dan
 - 3) PSBDT
3. Terkait dengan efektivitas edukasi dan komunikasi, rekomendasi rencana aksi berupa elakukan kegiatan Edukom baik insidental dengan kunjungan langsung maupun secara formal mengundang stakeholders dalam kerangka sosialisasi/FGD
4. Terkait realisasi penyelesaian berkas piutang negara, rekomendasi rencana aksi berupa:
 - 1) Penagihan berdasarkan clustering nominal piutang debitur untuk mengantisipasi outstanding;
 - 2) Mengajukan permohonan Lelang untuk debitur Kho Soe Hiong
 - 3) Pengembalian BKPN ke Penyerah Piutang
5. Terkait dengan kepuasan pengguna layanan, rekomendasi rencana aksi berupa menyebarkan kuesioner kepada stakeholder setiap triwulan

d. Seksi Hukum dan Informasi

1. Terkait realisasi penerimaan negara, rekomendasi rencana aksi berupa:
 - 1) Menghadiri sidang secara efektif dan efisien
 - 2) Mengunggah jawab jinawab e court secara tepat
2. Terkait pengelolaan layanan informasi publik rekomendasi rencana aksi berupa:
 - 1) Melakukan koordinasi dengan seksi teknis terkait sumber data
 - 2) Melakukan penyediaan dan pemutakhiran daftar informasi publik yang wajib dipublikasikan

e. Seksi Kepatuhan Internal

1. Terkait dengan integritas, rekomendasi rencana aksi berupa monitoring pengisian SPI.
2. Terkait dengan kepuasan pengguna layanan, rekomendasi rencana aksi berupa menyebarkan kuesioner kepada stakeholder setiap triwulan

3. Terkait dengan Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko, rekomendasi rencana aksi berupa melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan kinerja Organisasi dan Pegawai secara berkala
 4. Terkait dengan capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI WBK/WBBM, rekomendasi rencana aksi berupa monitoring dan evaluasi secara berkala dan menyusun laporan.
- f. Pelayanan Lelang
1. Terkait dengan realisasi penerimaan negara, rekomendasi rencana aksi berupa:
 - 1) Melakukan Monev dengan para pemohon untuk meningkatkan capaian sampai dengan akhir tahun 2025
 - 2) Melakukan koordinasi dengan pemohon lelang untuk meningkatkan capaian PNBPN lelang
 2. Terkait dengan realisasi pokok lelang, rekomendasi rencana aksi berupa:
 - 1) Melakukan Monev dengan para pemohon untuk meningkatkan capaian sampai dengan akhir tahun 2025
 - 2) Melakukan koordinasi dengan pemohon lelang untuk meningkatkan capaian PNBPN lelang
 3. Terkait dengan efektivitas edukasi dan komunikasi, rekomendasi rencana aksi berupa elakukan kegiatan Edukom baik insidental dengan kunjungan langsung maupun secara formal mengundang stakeholders dalam kerangka sosialisasi/FGD
 4. Terkait dengan produktivitas lelang, rekomendasi rencana aksi berupa:
 - 1) Memprioritaskan lelang yang akan laku
 - 2) Berkoordinasi dengan pemohon lelang untuk meningkatkan lelang yang laku
 - 3) Mempercepat verifikasi lelang barang bergerak untuk meningkatkan produktivitas lelang
 - 4) Melakukan Monev dengan pemohon lelang HT
 5. Terkait dengan kepuasan pengguna layanan, rekomendasi rencana aksi berupa menyebarkan kuesioner kepada stakeholder setiap triwulan
- g. Pelayanan Penilaian
1. Terkait dengan kualitas layanan penilaian, rekomendasi rencana aksi berupa:
 - 1) Melanjutkan kegiatan survei basis data.
 - 2) Membuat Database secara mandiri untuk lingkup KPKNL.
 - 3) Memberikan bahan masukan mengenai pembuatan alat bantu perhitungan penilaian.
 2. Terkait dengan kepuasan pengguna layanan, rekomendasi rencana aksi berupa menyebarkan kuesioner kepada stakeholder setiap triwulan

B. Realisasi Anggaran

Tahun Anggaran 2024 KPKNL Bekasi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp6.693.637.000.00 (enam miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). Anggaran yang telah direalisasikan untuk mewujudkan kinerja organisasi KPKNL Bekasi berdasar Penyerapan Anggaran, Capaian Keluaran Riil, dan Capaian Efisiensi sebagai berikut:

1. Penyerapan Anggaran : Rp 2.353.323.000,00
2. Anggrandiblokir : Rp 4.288259.000,00
2. Capaian Keluaran Riil : 97,83%

C. Inovasi dan Prestasi Kerja

1. Inovasi

a. Inovasi dan Teknologi Informasi

KPKNL Bekasi memfasilitasi pembuatan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) melalui Pojok SKPT.

b. Program Perubahan

Dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan peraturan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, dibentuk Program Perubahan pada KPKNL Bekasi sebagai berikut:

1) Program Revitalisasi dan Penyempurnaan Area Pelayanan Terpadu (REPEAT)

Revitalisasi dan Penyempurnaan APT sebagai *public face* KPKNL Bekasi, yaitu image/wajah keseluruhan KPKNL Bekasi yang tercermin di depan stakeholder. APT merupakan salah satu titik awal dan akhir interaksi KPKNL Bekasi dengan stakeholder sehingga sangat penting untuk memberikan impresi yang baik. Program ini dinamakan REPEAT karena aktivitas dan kegiatan di APT merupakan proses yang berulang. Proses ini seharusnya memberikan perbaikan dan peningkatan berkelanjutan (*continuous improvement*) menjadi lebih baik di setiap repetisinya.

Penerapan program REPEAT terdiri dari beberapa fokus utama sebagai berikut:

- a) Revitalisasi dan Penyempurnaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas (REPEAT SARPRAS), yaitu pemenuhan dan peningkatan fasilitas fisik APT.
- b) Revitalisasi dan Penyempurnaan Sumber Daya Manusia (REPEAT SDM), yaitu pemenuhan dan peningkatan Sumber Daya Manusia APT.

c) Revitalisasi dan Penyempurnaan Proses Bisnis (REPEAT SOP), yaitu pemenuhan dan peningkatan Proses Bisnis APT.

2) Motion (Monthly Evaluation)

Evaluasi merupakan implementasi dari Nilai Kementerian Keuangan yaitu Kesempurnaan. Dalam rangka menuju kesempurnaan, KPKNL Bekasi senantiasa melakukan *continues improvement* melalui evaluasi pada setiap aktivitas yang dilakukan. Monthly Evaluation dilakukan setiap bulan sebagai evaluasi atas kinerja organisasi yang dilakukan KPKNL Bekasi dalam periode bulan sebelumnya. Evaluasi ini dilakukan setiap bulan guna mengidentifikasi pencapaian, kendala, serta solusi perbaikan yang dapat diterapkan. Kegiatan ini bertujuan antara lain meningkatkan kinerja organisasi secara berkelanjutan, mendorong budaya evaluasi dan perbaikan yang berkesinambungan, meningkatkan koordinasi antar seksi/JF pada KPKNL Bekasi, memastikan setiap aktivitas di kantor berjalan sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan

3) Program Cengkrama Edukasi dan Idea (Rabu CENDEKIA)

Dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai KPKNL Bekasi, diperlukan sebuah wadah untuk berbagi pengetahuan, edukasi dan ide-ide pegawai. RABU CENDEKIA dijadwalkan rutin setiap Rabu untuk menambah kompetensi pegawai KPKNL Bekasi. Materi yang dibawakan tidak hanya meningkatkan pengetahuan teknis, tetapi juga soft-skill dan pengetahuan umum. Pegawai yang selesai melaksanakan diklat dijadwalkan untuk menjadi narasumber dalam RABU CENDEKIA. Sesekali waktu KPKNL Bekasi juga mendatangkan narasumber dari pihak yang berkompeten untuk menambah kualitas konten kegiatan ini.

4) Program Galang Semangat Pagi (GSP)

Kegiatan ini merupakan perwujudan budaya Kementerian Keuangan dalam waktu 15-20 menit. Dalam GSP tertuang komitmen dan disiplin pegawai KPKNL Bekasi dalam mengawali hari untuk mencapai tujuan organisasi. GSP diawali dengan pembukaan, pembacaan maklumat pelayanan bersama-sama, sharing informasi singkat (implementasi *one day one information*) dan ditutup dengan yel-yel bersama. GSP dijadwalkan pada pukul 08.00 s.d 09.00 WIB bergantian setiap harinya sehingga seluruh pegawai KPKNL Bekasi mendapatkan giliran untuk menyampaikan informasinya dan mendapatkan kesempatan untuk berbicara di depan publik (internal).

5) Program Sosialisasi, Interaksi dan Corporate Social Responsibility (SOLIDARITY)

Selain menjalankan tugas dan fungsinya sebagai kantor pelayanan pemerintah sesuai dengan aturan yang berlaku, KPKNL Bekasi juga melakukan interaksi sosial sebagai bagian dari masyarakat. KPKNL Bekasi senantiasa berusaha memberikan kontribusi lebih di luar tugas dan fungsinya. Selama ini KPKNL Bekasi telah melaksanakan sosialisasi dan interaksi baik kepada stakeholder

maupun kepada masyarakat secara umum. SOLIDARITY merupakan wadah untuk mendokumentasikan dan *public campaign* kegiatan tersebut.

- 6) Program Bintal (Pembinaan Mental Pegawai)
KPKNL Bekasi berusaha melakukan perubahan dalam hal pembentukan karakter perilaku/akhlak yang baik dan ihsan dalam beramal khususnya bagi pegawai yang beragama Islam berdasarkan pemahaman dan pengamalan hadits sebagai pedoman setelah Kitab suci Al Quran dengan membuat melalui program “Jodoh” (*just one day one hadits*) untuk pembentukan karakter yang memperkuat Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dan program Budaya Kerja Kementerian Keuangan. Kegiatan pembinaan mental pegawai dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Kamis setelah sholat Ashar berjamaah.
- c. Inovasi Prosedur dan Layanan
- 1) Pendekatan Kepada Pengguna Layanan Melalui *Whatsapp Care*
KPKNL Bekasi senantiasa berupaya untuk dekat dengan pengguna layanan melalui dibukanya kanal informasi berbasis aplikasi Whatsapp. Melalui aplikasi ini Pengguna layanan dilayani, melalui 2 (dua) metode, yaitu diskusi chat interaktif senin sampai dengan jumat pkl. 8.00 sampai dengan pkl 16.00.
 - 2) *One Day One Service* Penetapan Lelang
Khusus permohonan penjualan BMN, permohonan penetapan lelang akan ditetapkan 1 (satu) hari sejak sejak dokumen lengkap diterima. Hal tersebut merupakan percepatan dari SOP Layanan Unggulan DJKN dengan norma waktu 2 (dua) hari.
 - 3) *One Day One Service* Penetapan Status Pengguna BMN Berupa Tanah dan/atau Bangunan Khusus permohonan status penggunaan BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan. Surat Keputusan akan ditetapkan 1 (satu) hari sejak dokumen lengkap.
 - 4) Sinergi Pelayanan Persetujuan Penjualan BMN Dengan Pelayanan Lelang
Sinergi pelayanan dimaksud dalam hal kelengkapan dokumen permohonan lelang BMN yang harus dilampirkan oleh satuan kerja pemohon lelang. Dalam hal ini, satuan kerja tidak perlu melampirkan kembali surat persetujuan Penjualan BMN ketika mengajukan permohonan lelang. Layanan ini berlaku untuk surat persetujuan penjualan BMN yang diterbitkan KPKNL Bekasi.

2. Prestasi dan Penghargaan

Prestasi yang pernah diraih oleh KPKNL Bekasi:

- a. Penghargaan sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2018);
- b. Penghargaan sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2021);
- c. Pejabat Lelang Kelas I Terbaik Ketiga Tahun 2017 dan 2019. (DJKN, 2018 & 2020);
- d. Juara 3 Kompetisi Pengelolaan BMN di Lingkungan Kementerian Keuangan (Kementerian Keuangan, 2020);

- e. Partisipasi dalam Kegiatan Lelang UMKM Tahun 2021 (Direktorat Lelang DJKN, 2021);
- f. Satker dengan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Kategori Penyampaian LPJ Penerimaan Terbaik Periode Semester I TA 2022 (KPPN Bekasi, 2022);
- g. Satker dengan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Kategori penyampaian Saldo Rekening Pemerintah Terbaik Periode Semester I TA 2022 (KPPN Bekasi, 2022);
- h. Juara 4 Lomba Cerdas Cermat dalam Rangkaian Kegiatan Carnival Penilaian 2022;
- i. Juara I Tenis Meja Ganda Putra bersama KPKNL Tangerang II sebagai Perwakilan Kantor Pusat DJKN dalam Hari Oeang ke 76 Tahun 2022;
- j. Juara II dalam Grand Final KOIN MAS 2022/2023 yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 untuk kategori Optimalisasi Aset Pada Pengelola Barang KOIN MAS 2022/2023.
- k. Juara II Kategori LPJ Bendahara Penerimaan Periode Semester I Tahun 2024.
- l. Peringkat Ketiga Capaian NKO Tahun 2024 di Wilayah Kerja Kanwil DJKN Jawa Barat
- m. Apresiasi dan Penghargaan Program Sertifikasi BMN Hulu midas Tahun 2025
- n. Satuan Kerja dengan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Predikat Terbaik Periode Semester I 2025
- o. Untuk tahun 2025, Capaian Nilai Kerja Organisasi (NKO) sebesar 115,31%

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan kinerja KPKNL Bekasi secara umum pada Tahun Anggaran 2025 adalah istimewa. Sebagian besar target yang telah ditetapkan berdasar Indeks Kinerja Utama (IKU) sesuai Kontrak Kinerja Kepala Kantor bisa tercapai dengan baik kecuali IKU IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang. Adapun Nilai Kinerja Organisasi (NKO) per 31 Desember 2025 tercapai sebesar 115,31%.

Di samping itu, KPKNL Bekasi sebagai Kantor Pelayanan Percontohan peringkat II tingkat Kementerian Keuangan Tahun 2016 dan peraih predikat Wilayah Bebas Korupsi tahun 2018, serta peraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tahun 2020, tetap mempertahankan pelayanan prima yang bebas korupsi kepada stakeholder. KPKNL Bekasi terus berusaha melaksanakan upaya perbaikan diri dari sisi pelayanan melalui pengembangan inovasi teknologi yang memudahkan tugas tugas sehari-hari. Hal ini menjadi bukti bahwa KPKNL Bekasi belum berpuas diri atas capaian yang sudah ada.

Diharapkan dengan capaian kinerja yang sangat memuaskan dan prestasi yang telah dicapai maupun yang ingin diraih tersebut, menjadi motivasi bagi segenap pegawai baik ditingkatan pelaksana sampai pimpinan untuk terus berusaha meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi. Kedepan KPKNL Bekasi akan mempertahankan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sebagai bukti keseriusan KPKNL Bekasi untuk terus bertransformasi dalam menjaga kualitas dan meningkatkan pelayanan.

LAMPIRAN



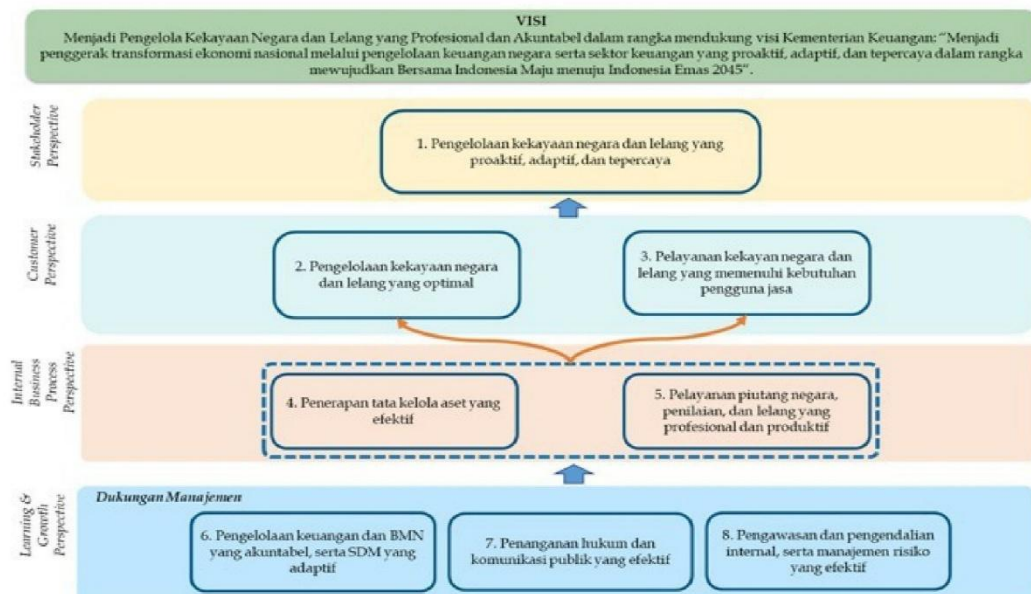
PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-02/WKN.08/2025
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
BEKASI
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
BEKASI
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	1a-CP	Indeks integritas	100
		1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp28,4 M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp798,2 M)
		2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp1,3 M)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
		3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5c-CP	Persentase produktivitas lelang	80%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100
		7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80
		8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100

Program/Kegiatan 2025

Anggaran

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



Program:	
Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	Rp789,285,000
Kegiatan	
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp30,094,000
2. Pengelolaan Aset	Rp759,191,000
Program:	
Program Dukungan Manajemen	Rp5,873,823,000
Kegiatan	
1. Legislasi dan Litigasi	Rp30,740,000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp5,808,053,000
3. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp14,997,000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp20,033,000

BEKASI TIMUR, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Jawa Barat



Ditandatangani Secara Elektronik
Tugas Agus Priyo Waluyo

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang Bekasi



Ditandatangani Secara Elektronik
Harmaji

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
BEKASI
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya							
1a-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp28,4 M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp798,2 M)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp1,3 M)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif							
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
6a-CP	Indeks kualitas kinerja	100	100	100	100	100	100	100



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	anggaran							
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80
8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	100	100	100	100	100	100

BEKASI TIMUR, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang Bekasi



Ditandatangani Secara Elektronik
Harmaji



**INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BEKASI
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025**

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan			

BEKASI TIMUR, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bekasi



Ditandatangani Secara Elektronik
Harmaji

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Harmaji		NAMA	Tugas Agus Priyo Waluyo
NIP	19690801 199603 1 001		NIP	19650828 199103 1 002
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I (IV/b)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya (IV/d)
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bekasi		JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bekasi		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	Indeks integritas	100	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp28,4 M)	Penerima Layanan
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	Penerima Layanan
		Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp798,2 M)	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp1,3 M)	Penerima Layanan
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	Penerima Layanan
		Indeks kepuasan pengguna layanan	77	Penerima Layanan
4	Penerapan tata kelola aset yang	Persentase Barang Milik Negara berupa	100%	Proses Bisnis

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



	efektif	tanah yang disertipikatkan		
		Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	Proses Bisnis
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	Proses Bisnis
		Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	Proses Bisnis
		Persentase produktivitas lelang	80%	Proses Bisnis
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> -Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah -Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara -Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> -Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan -Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas -Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> -Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi -Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah -Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



BEKASI TIMUR, 30 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik
Tugas Agus Priyo Waluyo
19650828 199103 1 002

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik
Harmaji
19690801 199603 1 001

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	40 pegawai							
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>								
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp28,4 M)
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp798,2 M)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp1,3 M)
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80
8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	100	100	100	100	100	100
KONSEKUENSI								

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>
	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>

BEKASI TIMUR, 30 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik
Tugas Agus Priyo Waluyo
19650828 199103 1 002

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik
Harmaji
19690801 199603 1 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



NILAI KINERJA ORGANISASI
KPKNL BEKASI
 Periode s.d Triwulan IV 2025

Kode	IKU	Polarisasi	V/C	Target	Realisasi	Bobot IKU	Bobot Tertimbang IKU	Indeks Capaian IKU	Indeks Max. 120	Nilai Sasaran Strategis	Nilai Perspective
				s.d Triwulan IV	s.d Triwulan IV						
Stakeholder Perspective (30%)											
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	-	-							111.53	111.53
1a-CP	Indeks Integritas	Max	P/L	100.00	105.29	19.00%	57.58%	105.29	105.29	60.62	
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	Max	P/M	100.00%	124.42%	14.00%	42.42%	124.42	120.00	50.91	
Customer Perspective (20%)											
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	-	-							104.70	112.09
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	Max	P/L	100.00%	137.58%	19.00%	36.54%	137.58	120.00	43.85	
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	Max	P/L	100.00%	78.13%	19.00%	36.54%	78.13	78.13	28.55	
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	Max	P/M	100.00%	172.72%	14.00%	26.92%	172.72	120.00	32.31	
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	-	-							119.48	
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	Max	P/M	74.00	88.03	14.00%	50.00%	118.95	118.95	59.48	
3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan ⁽¹⁾	Max	P/M	77.00	96.64	14.00%	50.00%	125.50	120.00	60.00	
Internal Process Perspective (25%)											
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	-	-							118.47	119.03
4a-CP	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	Max	P/M	100.0%	132.16%	14.00%	50.00%	132.16	120.00	60.00	
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	Max	P/M	100.0%	116.94%	14.00%	50.00%	116.94	116.94	58.47	
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	-	-							119.58	
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	Max	P/M	100.0%	118.75%	14.00%	33.33%	118.75	118.75	39.58	
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	Max	P/M	70.0%	114.57%	14.00%	33.33%	163.67	120.00	40.00	
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	Max	P/M	80.0%	136.66%	14.00%	33.33%	170.82	120.00	40.00	
Learning and Growth Perspective (25%)											
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	-	-							120.00	118.68
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	Max	P/M	100.00	120.00	14.00%	33.33%	120.00	120.00	40.00	
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Max	P/M	100.00	120.00	14.00%	33.33%	120.00	120.00	40.00	
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	Max	P/M	80.00%	98.00%	14.00%	33.33%	122.50	120.00	40.00	
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	-	-							116.03	
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	Max	P/M	100.00	112.06	14.00%	50.00%	112.06	112.06	56.03	
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	Max	P/M	80.00	115.75	14.00%	50.00%	144.69	120.00	60.00	
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	-	-							120.00	
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	Max	P/M	80.00	99.17	14.00%	50.00%	123.96	120.00	60.00	
8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	Max	P/M	100.00	120.00	14.00%	50.00%	120.00	120.00	60.00	
NKO											115.30

Daftar Penghargaan Yang diraih KPKNL Bekasi Tahun 2025

No.	Kategori Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Penerima Penghargaan
1	Peringkat Ketiga Capaian NKO Tahun 2024 di Wilayah Kerja Kanwil DJKN Jawa Barat	Kanwil DJKN Jawa Barat	KPKNL Bekasi
2	Apresiasi dan Penghargaan Program Sertifikasi BMN Hulu midas Tahun 2025	SKK Migas- Pertamina	KPKNL Bekasi
3	Satuan Kerja dengan Kinerja Pelaksanaan AnggaranPredikat TerbaikPeriode Semester I 2025	KPPN Tipe A1 Bekasi	KPKNL Bekasi

Foto Penghargaan



